

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dengan menggunakan Teori Charles O. Jones, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan indikator organisasi, terkait SDM yang ada pada dinas bahwa staff di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan merasa tidak puas dengan pembekalan keterampilan yang mereka terima. Hal ini disebabkan kurangnya pelatihan yang memadai, terutama dengan adanya transisi ke sistem daring. Dan terkait sumber daya fasilitas bahwa Fasilitas yang disediakan untuk mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru juga dinilai kurang memadai. Sarana seperti Aplikasi Merdeka Belajar memang tersedia untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran para guru. Namun, kendala lain yang muncul adalah keterbatasan akses internet dan perangkat yang memadai, yang perlu disiapkan secara mandiri oleh para guru.
2. Pada indikator interpretasi, Dalam pelaksanaannya kebijakan sertifikasi guru sudah tersampaikan dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan pemahaman para pemimpin dan staff pelaksana kebijakan serta guru akan sasaran dan tujuan adanya sertifikat pendidik.
3. Pada aspek penerapan, pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru di Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik, karena implementasinya telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam SOP. Informasi mengenai pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik guru juga telah disediakan secara lengkap dan jelas. Guru yang telah memiliki akun SIMPKB dapat mengakses informasi tersebut secara individu. Selain itu, SIMPKB sudah terintegrasi dengan data Dapodik guru, sehingga guru diharuskan untuk

rutin memeriksa akun SIMPKB mereka guna mengetahui pembaruan data yang mungkin terjadi.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan, maka dapat didapatkan suatu saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan perlu adakan sesi sosialisasi secara tatap muka lebih sering, meskipun dilakukan secara daring. Pertemuan langsung dapat memperjelas informasi dan menjawab pertanyaan guru secara *real-time*.
2. Dinas Pendidikan perlu menyelenggarakan webinar dan workshop yang fokus pada penjelasan detail kebijakan sertifikasi guru dan prosedur yang harus diikuti oleh para guru.
3. Tingkatkan peran aktif kepala sekolah dalam menyampaikan informasi kepada guru. Kepala sekolah harus memastikan bahwa setiap guru di sekolahnya memahami dan siap mengikuti proses sertifikasi.
4. Berikan pelatihan khusus bagi Dinas Pendidikan yang bertugas melakukan sosialisasi agar mereka lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan menjawab pertanyaan dari guru.
5. Perlu adanya penguatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Dirjen Dikti, LPTK, dan dinas pendidikan untuk memastikan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien.
6. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk akses internet dan perangkat teknologi, untuk mendukung pelaksanaan program sertifikasi guru secara daring.
7. Dinas pendidikan perlu bekerjasama dengan pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap kemampuan setiap guru terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga permasalahan dalam ketidakmampuan guru dalam mengakses secara mandiri dapat teratasi.
8. Pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan dukungan finansial untuk sekolah, terutama untuk mendukung pengadaan fasilitas yang diperlukan untuk program sertifikasi guru.